



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota serta masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana Kerja ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun *stakeholders* dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi/OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.



Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan Tahun 2025 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya di tahun 2024 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan adalah : 1) Tahap persiapan kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Perkimtan dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD Tahun 2024 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Dinas Perkimtan. 2) Tahap kegiatan analisis dan pengkajian dokumen kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RKPD Provinsi Sumatera Barat yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Dinas Perkimtan yang memuat visi, misi arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas



pemerintah khususnya pada urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkimtan juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Renja OPD disusun oleh tim penyusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada dokumen perencanaan terkait menjadi dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
  14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
  15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 600 - 469 - 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 adalah memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja dinas tahun 2025 adalah :

1. Mensikronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD tahun 2025.
2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dengan anggaran.
5. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### 1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Awal Renja Dinas Perkimtan terdiri dari :

##### 1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perkimtan, proses penyusunan Renja Dinas Perkimtan, Keterkaitan antara Renja Dinas Perkimtan dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur



tentang SOTK, urusan kewenangan Dinas Perkimtan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perkimtan tahun 2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perkimtan serta susunan dokumen laporan.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menguraikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perkimtan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2025

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkimtan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perkimtan Tahun 2021-2026.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

---

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD**

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2023 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 123.439.717.450,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program (7 program urusan dan 1 program penunjang) meliputi 14 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2023 adalah Rp. 121.200.546.670,00 dengan realisasi keuangan sebesar 98,19% dan realisasi capaian fisik sebesar 99,33%, dengan realisasi belanja langsung yang terdiri dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasarannya dapat diuraikan berikut ini :



- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.619.158.462,00 dan realisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 8.476.086.625,00 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.698.750,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 148.554.050,00 atau 96,03% dengan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan yaitu:
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.850.137.604,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 6.738.658.863,00 atau 98,37% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.
    - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
  - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.738.658.863,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 104.118.500,00 atau 94,42% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD.
  - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 782.286.656,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 766.771.062,00 atau 98,02% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Kegiatan Administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.667.952,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 65.367.680,00 atau 99,94% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.100.000,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 52.616.470,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%, berupa sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2) Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.946.700,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 21.812.481,00 atau 81,78% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.946.700,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 121.812.481,00 atau 81,78% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.
- 3) Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.960.300,00 dengan realisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 1.333.430.722,00 atau 98,70% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.960.300 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 45.116.496,00 atau 88,53% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :



- Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
- b) Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 1.288.314.226,00 atau 99,10% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan yaitu :
- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.137.432.438,00 dengan realisasi sampai desember 2023 sebesar Rp. 111.095.997.263,00 atau 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.137.432.438,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 111.095.997.263,00 atau 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari sub kegiatan berikut :
- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
  - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
- 5) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran Rp. 41.585.850,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 40.185.150,00 atau 96,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.585.850,00 terealisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 40.185.150,00 atau 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan
- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 6) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan alokasi anggaran Rp. 79.999.800,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 75.748.550,00 atau 94,69% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.999.800,00



teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 75.748.550,00 atau 94,69% dan realisasi fisik sebesar 100% dilaksanakan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

7) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 39.999.950,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 37.373.630,00 atau 93,43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 39.999.950,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 37.373.630,00 atau 93,43% dan realisasi fisik sebesar 100% serta pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

8) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran Rp. 21.633.950,00 teralisasi sampai Desember 2023 sebesar Rp. 19.912.249,00 atau 92,04% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 65.000.000,00 teralisasi sampai Desember 2023 adalah Rp. 61.535.300,00 atau 94,67% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.



**Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
1	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>									
1.04	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
1.04.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>									
1.04.01 1.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>dokuman</b>	<b>7</b>	<b>154.698.750,00</b>	<b>7</b>	<b>148.554.050,00</b>	<b>100%</b>	<b>96,03%</b>	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokuman	4	53.353.750,00	4	51.273.650,00	100%	96,10%
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	laporan	3	101.345.000,00	3	97.280.400,00	100%	95,99%
1.04.01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perkimtan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>6.850.137.604,00</b>	<b>12</b>	<b>6.738.658.863,00</b>	<b>100%</b>	<b>98,37%</b>	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	orang	58	6.452.849.604,00	58	6.344.783.113,00	100%	98,33%
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	dokumen	1	377.263.000,00	1	374.914.000,00	100%	99,38%
	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang Disusun	dokuman	18	20.025.000,00	18	18.961.750,00	100%	94,69%
1.04.01 1.03	<b>Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>110.267.500,00</b>	<b>12</b>	<b>104.118.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>94,42%</b>	
	01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	110.267.500,00	1	104.118.500,00	100%	99,42%
1.04.01 1.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>persentase</b>	<b>60</b>	<b>130.835.000,00</b>	<b>60</b>	<b>70.170.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>53,63%</b>	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	stel	75	56.250.000,00	75	55.444.500,00	100%	98,57%
	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	orang	4	31.121.000,00	4	2.000.000,00	100%	6,43%
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Yang Dilaksanakan	kali	7	43.464.000,00	7	12.725.800,00	100%	29,28%
1.04.01	1.05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi umum Dinas Perkimtan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>782.286.656,00</b>	<b>12</b>	<b>766.771.062,00</b>	<b>100%</b>	<b>98,02%</b>
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	8.100.900,00	1	8.079.000,00	100%	98,64%
	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	90.636.300,00	1	90.317.330,00	100%	99,65%
	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	50.052.464,00	1	48.879.410,00	100%	97,66%
	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	96	12.420.000,00	96	12.405.000,00	100%	99,88%
	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	laporan	1	621.076.992,00	1	607.090.322,00	100%	97,75%
1.04.01	1.06	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>terselenggaranya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>43.086.000,00</b>	<b>12</b>	<b>37.013.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>85,91%</b>
	01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	unit	26	43.086.000,00	26	37.013.400,00	100%	85,91%
1.04.01	1.07	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa Penunjng Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>465.667.952,00</b>	<b>12</b>	<b>465.367.952,00</b>	<b>100%</b>	<b>99,94%</b>



Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	200	5.300.000,00	200	5.000.000,00	100%	94,34%
	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	orang	16	460.367.952,00	8	460.367.952,00	100%	100,00%
	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	orang	16		16		100%	
1.04.01	1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>60</b>	<b>256.100.000,00</b>	<b>60</b>	<b>252.616.470,00</b>	<b>100%</b>	<b>98,64%</b>
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	220.600.000,00	1	217.540.470,00	100%	98,61%
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	55	35.500.000,00	55	35,076,000,00	100%	98,81%
1.04.02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>148.946.700,00</b>		<b>121.812.481,00</b>		81,78%
1.04.02	1.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumateara Barat</b>	<b>dokuman</b>	<b>3</b>	<b>148.946.700,00</b>	<b>3</b>	<b>121.812.481,00</b>	100%	81,78%
	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Tersedia	dokuman	1	148.946.700,00	1	121.812.481,00	100%	81,78%
1.04.03		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>1.350.960.300,00</b>		<b>1.333.430.722,00</b>		<b>99,20%</b>
1.04.03	1.01	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	<b>persentase</b>	<b>12,66</b>	<b>50.960.300,00</b>	<b>12,66</b>	<b>45.116.496,00</b>	<b>100%</b>	<b>90,41%</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
	01	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan dan legalisasi untuk bidang perumahan yang disusun	dokuman	1	50.960.300,00	1	45.116.496,00	100%	90,41%
1.02		<b>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	<b>persentase</b>	<b>10</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>10</b>	<b>1.288.314.226,00</b>	<b>100%</b>	<b>99,53%</b>
	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	unit	180	1.300.000.000,00	180	1.288.314.226,00	100%	99,53%
1.04.05		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>113.137.432.438,00</b>		<b>111.095.997.263,00</b>		<b>98,20%</b>
1.04.05	1.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Tersedianya PSU Yang Menunjang Fungsi Permukiman</b>	<b>persentase</b>	<b>8,71</b>	<b>113.137.432.438,00</b>	<b>8,71</b>	<b>111.095.997.263,00</b>	100%	98,20%
	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman	dokuman	57	5.219.144.310,00	57	5.037.529.955,00	100%	96,52%
	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman	paket	19	107.918.288.128,00	19	106.058.467.308,00	100%	98,28%
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2.10		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				<b>183.219.550,00</b>		<b>173.219.579,00</b>		<b>94,54%</b>
2.10.03		<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>				<b>41.585.850,00</b>		<b>40.185.150,00</b>		<b>90,06%</b>
2.10.03	1.01	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>41.585.850,00</b>	<b>100</b>	<b>40.185.150,00</b>	<b>100%</b>	<b>96,63%</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	laporan	1	41.585.850,00	1	40.185.150,00	100%	96,63%
2.10.04		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>				<b>79.999.800,00</b>		<b>75.748.550,00</b>		<b>94,69%</b>
2.10.04	1.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>79.999.800,00</b>	<b>100</b>	<b>75.748.550,00</b>	<b>100%</b>	<b>94,69%</b>
	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	1	40.000.000,00	1	38.362.700,00	100%	95,91%
	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	1	39.999.800,00	1	37.385.850,00	100%	93,47%
2.10.05		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>				<b>39.999.950,00</b>		<b>37.373.630,00</b>		<b>93,43%</b>
2.10.05	1.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>39.999.950,00</b>	<b>100</b>	<b>37.373.630,00</b>	<b>100%</b>	<b>93,43%</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang terlaksana	laporan	1	39.999.950,00	1	37.373.630,00	100%	93,43%
2.10.06		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>				<b>21.633.950,00</b>		<b>19.912.249,00</b>		<b>92,04%</b>
2.10.06	1.01	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>21.633.950,00</b>	<b>100</b>	<b>19.912.249,00</b>	<b>100%</b>	<b>92,04%</b>
	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	laporan	1	21.633.950,00	1	19.912.249,00	100%	92,04%
		<b>TOTAL</b>				<b>123.439.717.450,00</b>		<b>121.200.546.670,00</b>		<b>98,19%</b>



**Tabel 2.2**  
**Tabel C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Pada s/d Tahun 2024**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>1.04</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>										
<b>1.04.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>										
<b>1.04.01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>dokuman</b>	<b>85</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>60%</b>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokuman	20	4	4	4	100%	4	12	60%
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Disusun	dokuman	5	1	-	-	-	-	2	20%
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD Yang Disusun	dokuman	10	2	-	-	-	-	2	20%
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokuman	5	1	-	-	-	-	1	20%
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokuman	10	2	-	-	-	-	2	20%
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	dokuman	15	3	3	3	100%	3	9	60%
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan	dokuman	20	4	-	-	-	4	12	60%
<b>1.04.01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perkimtan</b>	<b>bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60%</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	orang	290	58	58	58	100%	58	174	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Honor	orang	175	35	35	35	100%	35	105	60%
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang Disusun	dokuman	90	18	18	18	100%	-	36	40%
04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokuman	Kep men 2023	-	-	-	-	4	4	Undefined
<b>1.04.01 1.03</b>	<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi barang milik daerah perangkat daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60%</b>
01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	dokuman	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>1.04.01 1.04</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>persentase</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>38,33%</b>
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	stel	375	75	-	-	-	75	150	40%
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	orang	20	4	-	-	-	7	11	55%
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Yang Dilaksanakan	kali	35	7	-	-	-	-	7	20%
<b>1.04.01 1.05</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya administrasi umum Dinas Perkimtan</b>	<b>bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah	830	166	166	166	100%	166	498	60%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	250	50	-	-	-	-	50	20%
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	215	43	43	43	100%	43	129	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	70	14	14	14	100%	14	42	60%
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	480	96	96	96	100%	96	288	60%
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	dokuman	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>1.04.01 1.06</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>terselenggaranya pengadaan barang milik daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	-	-	-	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>
01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	unit	130	26	-	-	-	-	26	20%
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan	Unit	4	-	-	-	-	-	-	-
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	-	-	-	-	28	28	-
04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	-	1	1	-
<b>1.04.01 1.07</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	1000	200	1 laporan	1 laporan	100%	200	600	60%
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Beban Biaya Jasa SIPKD Point dibayarkan	bulan	40	8	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	60%
		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Tersedia	orang	80	16	16	16	100%	4 laporan	4 laporan	60%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>1.04.01 1.08</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>persentase</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60%</b>
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	5	1	1	1	100%	1	3	60%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	unit	40	8	7	7	100%	8	24	60%
	02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	275	55	55	55	100%	60	170	62%
	03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	unit	5	2	-	-	-	1	3	60%
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>										
<b>1.04.02 1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>dokuman</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>60%</b>
	01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Yang Tersedia	dokuman	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>1.04.02 1.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>20%</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Teknis penyediaan dan Reahabilitasi Rumah kepada Masyarakat Tanggap Bencana\	orang	250	50	-	-	-	-	50	20%
02	Sosialisai Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Reahabilitasi Rumah kepada Masyaaakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	orang	250	50	-	-	-	-	50	20%
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
<b>1.04.03 1.01</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Penurunan Luas Kawasan Kumuh</b>	<b>persentase</b>	<b>63</b>	<b>16,88</b>	<b>12,66</b>	<b>2,36</b>	<b>98%</b>	<b>1</b>	<b>37,98</b>	<b>60%</b>
01	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan dan legalisasi untuk bidang perumahan yang disusun	dokuman	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Terlaksana	laporan	5	1	-	-	-	-	1	20%
<b>1.02</b>	<b>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Berkurannngnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi</b>	<b>persentase</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2,36</b>	<b>98%</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60%</b>
01	Penyusunan Rencana Tapak (sitePlan) dan Detail Engineering Design (DED), Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Dokumen Site Plan Yang Disusun	dokuman	25	5	-	-	-	-	5	20%



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH pada Kawasan Kumuh Yang Ditangani	unit	100	180	20	57	285%	20	257	257%
03	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditangani	kawasan	30	8	6	2	33%	6	16	53%
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>										
<b>1.04.05 1.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Tersedianya PSU Yang Menunjang Fungsi Permukiman</b>	<b>persentase</b>	<b>44</b>	<b>30,49</b>	<b>20</b>	<b>108</b>	<b>311%</b>	<b>20</b>	<b>26,13</b>	<b>86%</b>
01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan/DED PSU Permukiman	dokumen	285	57	57	57	100%	57	171	60%
02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan peningkatan PSU Permukiman	lokasi	1000	756	200	626	100%	200	1582	158%
03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman	laporan	5	1	-	-	-	1	2	40%
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>										
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>										
<b>2.10.03 1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60%</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan hasil kegiatan pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>										
<b>2.10.04 1.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas penggunaan dan pemanfaatan tanah garapan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60%</b>
01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.10.05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>										
<b>2.10.05 1.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60%</b>



Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar											
Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Pogram dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang terlaksana	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>										
<b>2.10.06 1.01</b>	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan pemanfaatan tanah di Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60%</b>
01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Laporan hasil inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kep men 2023	-	-	-	-	1	1	Undefined
<b>2.10.07</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>										
<b>2.10.07 1.01</b>	<b>Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>persentase</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilaksanakan	laporan	5	1	-	-	-	1	1	20%



Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tahun 2024 pada kegiatan :
    - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja terdapat 4 sub kegiatan yang tidak terealisasi sampai saat ini karena tidak digunakan lagi akibat adanya pemutakhiran nomenklatur kode sub kegiatan.
    - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdapat 2 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi ASN termasuk sub keg setelah pemutakhiran tahun 2023 tidak digunakan lagi dan sub kegiatan baru karena pemutakhiran nomenklatur yaitu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD belum ada capaian kinerja karena merupakan sub kegiatan baru yang digunakan pada Tahun 2024
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 3 sub kegiatan yang rendah capaian targetnya karena sub kegiatan pengadaan pakaian dinas, pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak dianggarkan pada Tahun 2023 terkait efisiensi anggaran dan untuk Tahun 2024 sub kegiatan bimtek juga tidak dianggarkan karena bimbingan teknis lebih banyak dilaksanakan secara daring akibatnya sub keg ini tidak dapat direalisasikan.
    - Administrasi umum perangkat daerah terdapat satu sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang capaiannya baru 20% karena pada tahun 2023 tidak dianggarkan karena melakukan efisiensi anggaran.
    - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdapat 4 sub kegiatan yang realisasinya tidak tercapai sesuai target karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi dan perubahan prioritas anggaran akibat adanya kebutuhan mendesak lainnya, sehingga anggaran untuk pengadaan barang terpaksa dialihkan.



- b. Program Pengembangan Perumahan terdapat satu kegiatan yang tidak terealisasi sesuai rencana yaitu sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi karena kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika terjadi bencana alam dengan sasaran adalah masyarakat yang terdampak bencana alam.
- c. Program Kawasan Permukiman terdapat tiga sub kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :
- Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi akbatnya Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak dilaksanakan
  - Penyusunan rencana tapak (siteplan) dan Detail Engineering Design (DED), peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha tidak dilaksanakan lagi karena adanya pemutakhiran nomenklatur pada Tahun 2023
  - Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha capaian kinerja kurang dari target pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi sehingga target tahunan yang sudah ditetapkan untuk menangani 6 kawasan kumuh setiap tahun tidak tercapai.
- d. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee terdiri dari satu kegiatan dan dua sub kegiatan sebagai output dari program. Terdapat salah satu sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu sub kegiatan koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria lintas daerah kabupaten/kota karena merupak sub kegiatan baru yang dikeluarkan oleh Kepmendagri Perubahan Nomenklatur tahun 2023.
- e. Program Penetapan Tanah Ulayat terdiri dari satu kegiatan dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilaksanakan. Sub kegiatan ini tidak memenuhi target karena baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perda Tanah Ulayat yang baru ditetapkan pada Tahun 2024.



2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari delapan kegiatan. Tujuh kegiatan target capaian kinerja memenuhi serta sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi terhadap capaian renstra lebih kurang 60%.
  - b. Program Kawasan Permukiman terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha dan kegiatan Peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. Capaian realisasi kegiatan ini terhadap renstra sesuai dengan rencana target yaitu 60%.
  - c. Untuk urusan bidang pertanahan terdapat lima program dan empat program yaitu program pengadaan tanah untuk kepentingan umum, program penyelesaian sengketa tanah garapan, program penyelesaian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee realisasi capaian kinerja terhadap renstra dapat memenuhi target sesuai yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Program Kawasan Permukiman terdapat sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha capaian realisasinya terhadap rencana strategis sudah melebihi target sebesar 257% karena banyaknya alokasi anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota dewan provinsi untuk penanganan rumah tidak layak huni yang berada di kawasan kumuh.
  - b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdapat terdapat sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi permukiman capaian realisasinya terhadap renstra sudah melebihi target sebesar 158% karena banyaknya alokasi anggaran yang bersumber dari aspirasi anggota dewan provinsi untuk menyediakan PSU pada permukiman masyarakat karena pembangunan PSU langsung memenuhi kebutuhan masyarakat akan



infrastruktur dasar yang layak dan meningkatkan aksesibilitas pada lingkungan permukiman.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :
  - a. Penyesuaian beberapa sub kegiatan akibat adanya pemutakhiran nomenklatur, kodefikasi dan perubahan kode rekening menyebabkan target yang sudah ditetapkan pada renstra tidak dapat tercapai.
  - b. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mewujudkan program-program perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan khususnya dalam penanganan kawasan kumuh provinsi akibatnya target tidak dapat dicapai sesuai dengan rencana.
  - c. Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang perumahan dan permukiman untuk melaksanakan program yang terlalu banyak paket pekerjaannya.
  - d. Banyaknya kawasan kumuh kewenangan provinsi yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan alokasi anggaran terbatas.
5. Implikasi Yang timbul terhadap capaian program renstra adalah :
  - a. Capaian tidak memenuhi target :
    - Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat apabila tidak memenuhi target akan menurunkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat seperti rendahnya akses terhadap rumah layak dan infrastruktur lainnya
    - Kendala dalam mendapatkan alokasi anggaran akan berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya
  - b. Capaian memenuhi target akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak dan infrastruktur dasar yang memadai serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kinerja urusan perumahan dan kawawan permukiman.
  - c. Capaian melebihi target akan memberikan implikasi dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan masyarakat serta meningkatnya kesadaran berbagai pihak untuk turut serta berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar atau PSU Permukiman. Adanya aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang banyak ditujukan



untuk penyediaan PSU Permukiman juga memberikan implikasi melebihi target.

6. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah :
  - a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai
  - b. Mengoptimalkan postur APBD dalam rangka pencapaian target kinerja yang belum tercapai
  - c. Penyesuaian target kinerja dengan kondisi yang ada dan sumberdaya yang tersedia.
  - d. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi
  - e. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinas
  - f. Perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya
  - g. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan keberlanjutan program

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di atas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja.

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :



NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	6,52%	149,20%	
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	108,02%	313,00%	
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%	
			2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	
4		Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%
5		Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	85%	100%	

Sasaran Strategis adalah jabaran tujuan yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan dengan capaian target kinerjanya dalam jangka waktu tahunan pada dinas terdiri atas enam (6) sasaran dengan target kinerja sama dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Sasaran strategis 1 yaitu menurunnya kawasan kumuh untuk Tahun 2023 dilakukan perubahan target dari 14,18% menjadi 4,73% karena adanya keterbatasan pendanaan pada APBD Tahun 2023 sehingga mempengaruhi terhadap tindakan yang akan dilakukan pada kawasan kumuh provinsi. Tindakan pada kawasan kumuh provinsi berupa peningkatan PSU permukiman di Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan berupa penanganan kumuh untuk 6 kawasan setiap tahun. Sasaran Strategi 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak mengalami perubahan target tetap dilaksanakan sesuai dengan target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.



**Tabel 2. (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	✓		7,09%	14,18%	21,27%	28,35%	9,45%	6,52%	14,19 %	18,9%	Indikator ini diperkirakan sampai tahun 2025 tidak dapat mencapai target penanganan 6 kawasan kumuh setiap tahunnya karena alokasi anggaran terbatas
2	Persentase Peningkatan PSU Permukiman		✓	17,26 %	34,51%	51,77%	69,03%	65,24 %	62,60%	60%	60%	Penyediaan PSU Permukiman akan selalu melebihi target 200 lokasi setiap tahun karena banyaknya usulan aspirasi anggotadewan pada kegiatan
3	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	✓		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%	Indikator ini merupakan SPM Bidang Perumahan terkait kebencanaan dan sampai saat ini tidak ada bencana provinsi
4	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	✓		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%	Indikator ini merupakan SPM Bidang Perumahan terkait relokasi tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi
5	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permasalahan Pertanahan yang ditangani seluruhnya telah difasilitasi sesuai dengan kategori dan kewenangan
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	Peningkatan nilai kinerja dari B menjadi BB
7	Tingkat Kepuasan			85%	85%	85%	85%	85%	82,2%	85%	85%	Indikator penilaian



**b. Persentase Peningkatan PSU Permukiman**

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga kualitas permukiman menjadi meningkat dan masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan lancar. Komponen PSU untuk permukiman meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum. Penyediaan PSU permukiman merupakan salah satu urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat baik. Penyediaan PSU permukiman ditarget dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah 1000 lokasi dengan target penanganan PSU pertahun 200 lokasi atau 8,71 %. Lokasi permukiman tersebut didasarkan pada data jumlah nagari/kelurahan/desa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 1.159 nagari/desa/kelurahan. Penanganan PSU Permukiman pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan PSU di lingkungan permukiman sebagai penunjang fungsi permukiman dengan target 34,51% dan realisasi sebesar 108,02% serta capaian kinerja 313%.

Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang dilaksanakan pada 626 lokasi permukiman yang tersebar di enam belas kabupaten/kota. Peningkatan lokasi penanganan PSU permukiman pada Tahun 2023 karena adanya penambahan anggaran melalui dana usulan dari aspirasi anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat.

**c. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana dan Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**



Indikator ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan yang di dasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan rumah pasca bencana dan relokasi akibat program pemerintah. Peraturan ini menggaris bawahi tentang pembangunan baru yang berubah lokasi pembangunan kembali dengan lokasi tetap, bantuan membayar uang sewa, rehabilitasi peningkatan kualitas bagi warga yang rumahnya terkena bencana.

Standar Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2022 adalah 100%. Untuk capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan ini kinerjanya diukur dengan melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 akan dinilai 100% tidak harus merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana atau relokasi program. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam dan program relokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Realisasi kinerja sasaran strategis ini pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap rumah yang berada di kawasan rawan bencana dan sosialisasi terkait kebencanaan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dan luas tanah minimal 60 m<sup>2</sup>.
4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini adalah 100%, karena tidak ada bencana alam pada Tahun 2023 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



- b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu :
1. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal*/berdasarkan NSPK yang berlaku
  2. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
  3. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM karena masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman.
2. Ketersedian data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman.
3. Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
4. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada



lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.

5. Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km<sup>2</sup>, dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km<sup>2</sup> dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

#### d. Indikator Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani

Bidang pertanahan memiliki indikator Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani dengan target kinerja 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dari Sasaran Strategis :

- a. Fasilitasi penyelesaian sengketa atau masalah pertanahan yang diadakan masyarakat.

**Tabel  
Masalah Pertanahan Yang Di Fasilitasi Tahun 2021-2022**

NO	JENIS MASALAH	LOKASI	KETERANGAN	
			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Masalah Tanah Eks. Lapangan Terbang Jepang di Gadut	Kab. Agam	Permohonan Masyarakat untuk pendampingan permasalahan tanah di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Nomor : 100/329/GD/XII-2021	arena ini terkait dengan tanah TNI AU yang urusannya ke Pemerintah Pusat, maka memerlukan waktu yang lama dan memerlukan Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia UGM Yogyakarta
2.	Masalah pensertifikatan tanah melalui Notaris an. Anwar di Kota Padang.	Kota Padang	Proses Akta Jual Beli Tanah dan Pensertifikatkan Tanah an. Anwar melalui Notaris, yang tidak tepat waktu. (masalah waktu pelaksanaan)	Fasilitasi pertemuan/pendampingan Peny.masalah pensertifikatan tanah melalui Notaris an. Anwar di Kota Padang dengan Inventarisasi data dan informasi dari kedua belah pihak dan sudah dapat titik masalahnya, hingga sertifikat dan akta tanahnya sudah jadi
3	Masalah perpanjangan HGU PT. Gersindo Minang Plantation di	Kab. Pasaman Barat.	Ninik mamak pemegang hak ulayat Taluak Rantau Nagari Sasak Induak Nan	Inventarisasi data/dokumen dan koordinasi penyelesaian masalah Tanah dan Fasilitasi TS dan Surat



NO	JENIS MASALAH	LOKASI	KETERANGAN	
			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	Pasaman Barat		Barampek bermohon terhadap HGU PT. Gersindo Minang Plantation jangan diperpanjang dulu.	Ke Kanwil BPN permintaan masyarakat tidak perpanjangan HGU PT. Gersindo Minang Plantation di Pasaman Barat.
4	Masalah pensertifikatan tanah masyarakat di atas tanah negara eks, HGU PT. Tri Usaha Bakti- Solsel	Kab. Solok Selatan	Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 525/1898/BUP-PASBAR/X-2011, tgl 03 Oktober 2011, perihal penghentian operational PT. Agrosari Merapi di Kabupaten Pasaman Barat	
5	Masalah tanah HGB Hotel Maninjau di Kab. Agam	Kab. Agam	Surat dari Kerapatan Adat Nagari maninjau (KAN) nomor : 52/KAN-MIN/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dialamatkan Ke Bupati Agam perihal Permohonan tidak memberikan rekomendasi Perpanjangan Sertifikat HGB Maninjau Indah yang berkaitan dengan tanah ulayat Nagari Maninjau.	a. Keputusan Bupati Agam Tahun 1973 HGB tersebut merupakan tanah bekas kompleks Perusahaan Daerah Telaga Biru Maninjau. b. Keputusan Gubernur Prov. Sumbar tahun 1974, HGU tersebut merupakan tanah Negara bebas dan dikuasai langsung oleh Negara.
6	Masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya	Kab. Solok Selatan	Masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan yang belum dilaksanakan oleh PT. Bina Pratama Sakato Jaya kepada masyarakat melalui koperasi masyarakat yang akan dibentuk.	Koordinasi ke pemilik HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan dan Instansi terkait dan Inventarsiasi masalah kebun plasma HGU PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Solok Selatan. Penyusunan Kajian/Telaah staf terkait
7	Masalah Penguasaan Tanah bekas HGU PT. GNIBAT	Kota Padang	Masalah Tanah bekas HGU PT. GNIBAT Kota Padang sesuai pengaduan Sdr. Ridwan Kuasa Hukum Rafliis	Inventarisasi data, Kajian TS, dan Fasilitasi Surat ke Walikota Padang, BPN Kota Padang Penyelesaian Masalah Tanah bekas HGU PT. GNIBAT Kota Padang sesuai pengaduan Sdr. Ridwan Kuasa Hukum Rafliis
8	Masalah Penguasaan Tanah bekas HGU PT. Agro Sari Merapi di Nagari Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat	Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 759/663/Perkimtan/XII-2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tanah Bekas HGU untuk Pelaksanaan reforma Agraria	Belum adanya informasi lanjutan dari BPN
9	Masalah Pemanfaatan Tanah bekas HGU PT. Krakatau Limo Sejati di Bukik Gompong Kabupaten Solok	Kab. Solok	Surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 759/663/Perkimtan/XII-2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tanah Bekas HGU untuk Pelaksanaan reforma	Belum adanya informasi lanjutan dari BPN



NO	JENIS MASALAH	LOKASI	KETERANGAN	
			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			Agraria	
10	Masalah Tumpang Tindih Sertifikat di Nagari Tanjung Alai Kab. Solok	Kab. Solok	Perampasan Hak warga Nagari Tanjung Alai yang sudah bersertifikat, di jual oleh Joni Amril (Orang Nagari Aripan) ke PT. Lubuk Batu Jaya (Mardanus, Direktur) pada tahun 2021, sementara sertifikat masyarakat jauh sebelum tahun itu.	Kajian dan fasilitasi masalah Tumpang Tindih sertifikat tanah di Nagari Tanjung Alai , koordinasi dan sinkronisasi Pembahasan dan Inventarisasi data dan Informasi terkait masalah tanah masyarakat tersebut, bertemu dengan Wali Nagari Tanjung Alai bernama Yurdam,SE. Disampaikan bahwa : 1. Wali Nagari melaporkan ke Polek (Kasatrekim) dengan isi laporan perampasan Hak, dan kegiatan tambang batu Gamping wajib dihentikan, tapi masih saja. 2. Difloting dengan BPN Kab. Solok Aldo dan diambil titik Koordinat, tidak bisa memberikan keterangan /hasil Floting
11	Masalah tanah negara Eks. Eigendom Verponding 1794	Kota Padang	Upaya permohonan fatwa mahkamah agung, pencabutan penetapan pengadilan oleh wali kot	Adanya penetapan pengadilan negeri padang terkait angkat sita, sita tahan, untuk batas yang berbeda lokasinya. Dari 1 (satu) kelurahan menjadi 4 (empat) kelurahan

b. Fasilitasi penerbitan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai dengan permohonan atau Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu :

**Tabel  
Daftar Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  
Tahun 2023**

No	Pengadaan Tanah	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas	Lokasi
		Nomor	Tanggal			



No	Pengadaan Tanah	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas	Lokasi
		Nomor	Tanggal			
1.	Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin- Lubuk Alung – Padang Sta. 4,2-	590-706-2023	7 Februari 2023	Perpanjangan Penetapan Lokasi Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang seluas 281,05 Ha dengan SK Gubernur Nomor 620-54-2023 tanggal 7 Februari 2023.	281,05 Ha	Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kec. Enam Lingkung,. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
2.	Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Rokot-Sioban-Katiet	590-706-2023	17 Oktober 2023	Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah	9,58 Ha	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3.	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sumpur	600-842-2023	19 Desember 2023	Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sumpur di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kepada Bupati Pasaman.	26,78 Ha	Nagari Air Manggis, Nagari Air Manggis Utara, Nagari Air Manggis Barat, Nagari Air Manggis Selatan, Nagari Pauh, Nagari Durian Tinggi, Nagari Sundata Selatan dan Nagari Jambak di Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
4.	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Suliti dan Batang	120- 881-2023	28 Desember 2023	Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan	7,13 Ha	Nagari Koto Baru, Nagari Bomas, Nagari Pasir Talang Selatan, dan Nagari Pasar



No	Pengadaan Tanah	Keputusan Gubernur		Tentang	Luas	Lokasi
		Nomor	Tanggal			
	Bangko			Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Suliti dan Batang Bangko		Muara Labuh di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
5.	Pengadaan SisaTanah Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan)	120- 882- 2023	28 Desember 2023	Penetapan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah Pembangunan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan (Lanjutan) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	2,8692 Ha	Nagari Carocok Anau, Nagari Jinang Kampung Pansur, dan Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Pengadaan Tanah untuk Tambahan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Kandis	Sedang Proses	Sedang Proses		5,41 Ha	Kelurahan Lubuk Buaya dan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

c. Mengkoordinasikan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi penyediaan tanah bagi pembangunan, antara lain:

1. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian tanah D.I Batang Bayang di Kabupaten Pasaman.

Musyawarah dengan perwakilan pemilik tanah, agar menempuh upaya hukum melalui pengajuan keberatan ke PN atas besaran ganti kerugian yang ditetapkan appraisal.

Terhadap penetapan lokasi yang telah berkahir maka telah dilakukan koordinasi dan pembinaan ke intansi terkait untuk memberikan rekomendasi



pembaharuan penetapan lokasi, sehingga nantinya besaran ganti kerugian dihitung kembali oleh appraisal sesuai dengan penetapan lokasi pembaharuan.

2. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol seksi Padang-Kapalo Hilalang Sta 4+200 s/d Sta 36+600 Kab. Padang Pariaman.

Fasilitasi koordinasi dengan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN Prov. Sumbar. Fasilitasi TS dan Surat ke Kanwil BPN penyelesaian masalah pembayaran ganti rugi tanah sisa terkena jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang an. Hj. Miswarty, SH. Fasilitasi TS dan surat ke Kanwil BPN terkait pengaduan masalah Ganti Kerugian Jalan Tol Buyung Kamek, NIS 163. Kajian /Telahaan Staf dan Fasilitasi surat ke Dinas PMD untuk Persetujuan Izin Tukar Menukar Aset Tanah Nagari Sungai Buluh Selatan dengan tanah pengganti lain sebagai bentuk ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kab. Padang Pariaman.

3. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Suliti di Solok Selatan Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah D.I Batang Bayang di Pasaman Barat.

Dalam rangka penyelesaian pembayaran ganti kerugian lanjutan pengadaan tanah Batang Suliti di Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan koordinasi dengan BPN, Walinagari, dan Balai Sungai Sumatera V Padang bahwa untuk proses penyelesaian lanjutan pembayaran ganti kerugian diperlukan mengikuti tahapan pengadaan tanah yang dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi sehingga selanjutnya barulah dapat diproses pelaksanaan pembebasan tanahnya. Pada tahun 2022, kegiatan baru dapat diselesaikan oleh BWSS V sampai tahap perencanaan, Sedangkan proses penetapan lokasi tidak dapat dilanjutkan karena sesuai dengan Surat BWSS V Padang Nomor UM.02.06/Bws5/3034 tanggal 14 November 2022, anggaran untuk persiapan pengadaan tanah direlokasi ke kegiatan lain, sehingga proses penetapan lokasinya dijadwalkan pada tahun anggaran 2023..

4. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi tanah an. Hj Eni Asmar di Lokasi BP2IP Kab. Padang Pariaman.



Untuk pembangunan BP2IP sekarang bernama Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman telah bebas tanah seluas 32,4 Ha, namun masih terdapat sisa yang belum dibayarkan ganti kerugiannya sebanyak : 2 persil tanah total seluas 1,8 Ha, dan 1 unit bangunan. Untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian dimaksud, telah dilakukan koordinasi dan menyurati BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan :

- a. Surat Gubernur Nomor 759/227/Perimtan/VI-2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyelesaian Pembayaran Sisa Ganti Rugi Tanah/Bangunan, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di Ulakan Tapakis
- b. Surat Gubernur Nomor 759/344/Perkimtan/IX-2022 tanggal 9 September 2022 tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Poltekel Sumatera Barat an. Eni Asmar Aslim.

Berdasarkan surat tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan pembayarannya sesuai aturan yang berlaku. Jika waktu yang diberikan terlewati, kemungkinan Bank Nagari akan melakukan pelelangan, dan tentunya ini akan menyulitkan dalam penyelesaiannya, sementara lokasi tanah SHM Nomor 242 berada didalam areal lokasi Poltekel Sumatera Barat.

5. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian bangunan di atas tanah Yusneli Gami untuk BP2IP Kab. Padang Pariaman.
  - a. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Poltekel Padang Pariaman, dan Pemkab Padang Pariaman untuk pengumpulan data dan menyikapi putusan Pengadilan serta keberatan Hayati Induswari dimaksud.
  - b. Memberikan pemahaman kepada Hayati untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Fasilitasi TS dan surat ke Bupati Padang Pariaman dan Poltekel untuk penyelesaian masalah ganti kerugian tanah yang diklaim milik Nasir Rky Tambasa melalui kuasa hukumnya, Edi Dahmudi, SH, MH, di lokasi Poltekel Sumbar Kab. Padang Pariaman.
  - d. Fasilitasi Pembahasan Pembayaran Tanggung Renteng Ganti Rugi Bangunan Milik Yusneli Gami sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.
  - e. Rapat Pembahasan, koordinasi penganggaran, dan Pendampingan pelaksanaan anmaning. Dilakukan koordinasi ke Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan proses ulang penetapan lokasi untuk dasar dalam



melanjutkan proses pengadaan tanah atau pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Bandara Rokot Kab. Kep. Mentawai.

Dilakukan pembinaan, koordinasi dan sosialisasi aturan pembebasan tanah ke instansi terkait dan masyarakat penggarap untuk mekanisme penyelesaian. Terkait dengan permasalahan sengketa tanah tersebut, disarankan perlu kiranya dilakukan pengembalian batas tanah yang telah dibebaskan oleh BPN Kab. Kep. Mentawai. Hasil pengembalian batas itulah nantinya menjadi dasar dalam penentuan proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti kerugian selanjutnya untuk kebutuhan tambahan lahan bagi pengembangan Bandara Rokot.

Mengingat ada potensi konflik dalam pemilikan lahan, maka proses pengadaan tanah bagi tambahan lahan Pengembangan Bandara Rokot disarankan dilakukan melalui proses pengadaan tanah skala kecil namun melalui Tahapan dengan Penetapan Lokasi oleh Bupati Kep. Mentawai, dengan membuat DPPT dan Study Kelayakan minimal. Melalui sistem tahapan maka lahan yang masih bersengketa tersebut dapat tetap dikerjakan setelah ganti kerugian dititip ke pengadilan sehingga pembangunan Bandara Rokot tidak terhambat akibat sengketa tanah dimaksud

7. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi dan penentuan rencana lokasi trase jalan tol lanjutan Sicincin-Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota.

Koordinasi dan pembinaan ke Pemkab/ kota agar melakukan sosialisasi dan perhatian ke konsultan dalam menyusun rencana trase agar meminimalisir terkena lahan produktif, pe-mukiman, kuburan, masjid, sekolah dan fasilitas sosial.

8. Koordinasi penyelesaian masalah ganti rugi pengadaan tanah pengendalian banjir Batang Suliti Kab. Solok Selatan.

Dengan adanya 1 pemilik yang berperkara dipengadilan, maka terkait objek pengadaan tanah tersebut telah diajukan surat oleh BPN ke BWSS V untuk melakukan penitipan ganti kerugian ke pengadilan pada bulan Juli 2022. Untuk proses penitipan diminta kepada pihak BWSS V untuk segera berkoordinasi dengan pengadilan negeri sampai terbitnya Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagai dasar bagi BPN untuk proses pemutusan hubungan hukum dan pelaksanaan pembangunan.



Sehubungan dengan sisa kebutuhan tanah seluas 9 Ha bagi pembangunan Pengendalian Banjir Batang Bangko-Bt. Suliti di Kab. Solok Selatan, maka disarankan pembayaran ganti kerugiannya dilakukan melalui tahapan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dimulai tahapan perencanaan dan data-data pendukung bersedia diberikan BPN Kab. Solsel diantaranya laporan dan peta pelaksanaan pengadaan tanah yang telah selesai agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran nantinya.

9. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Akses Tarok City Kab. Padang Pariaman.

Dilakukan koordinasi ke Pemkab Padang Pariaman untuk melakukan proses ulang penetapan lokasi untuk dasar dalam melanjutkan proses pengadaan tanah atau pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fasilitasi inventarisasi data dan dokumen, survey lapangan dan rapat pembahasan serta rekomendasi untuk Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah Jalan Akses Tarok City (1 persil seluas 1.500 m<sup>2</sup> an. Silvia,cs.

#### **e. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Tujuan ketiga dari pohon kinerja adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD. Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan outcome pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB untuk tahun 2023. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2022 dengan nilai BB atau capaian sebesar 100%. Pencapaian target atas sasaran strategis ini merupakan data hasil evaluasi LAKIP OPD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi LAKIP Tahun 2023 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini karena hasil penilaian baru akan diterima pada bulan Maret 2023. Nilai yang disampaikan pada target kinerja adalah nilai LAKIP Tahun 2023. Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas LAKIP oleh Inspektorat Provinsi



dan peraturan sebagai dasar evaluasi adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah BB dengan besaran nilai 70,72. Realisasi nilai BB ini sudah sesuai dengan nilai yang ditarget dan masuk dalam kategori sangat baik. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 nilai evaluasi LAKIP yang diperoleh adalah B dengan nilai 69,94 yang masuk kategori baik. Jadi nilai LAKIP yang dicapai menunjukkan kenaikan yang baik. Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yaitu target nilai pada kategori BB pada Tahun 2023 dengan adanya kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tata kelola organisasi secara teknis. Diharapkan sampai akhir periode rencana jangka menengah target tetap dapat dicapai atau melebihi dari yang direncanakan dengan nilai BB atau sangat baik.

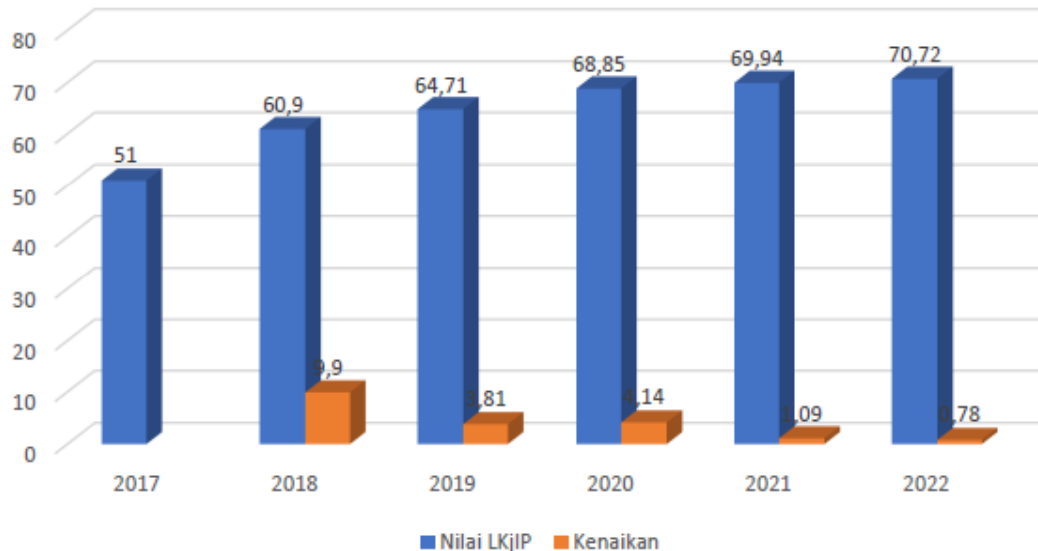
**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2021	2022	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	BB	B (69,94)	BB (70,72)	100%	101,03%

Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai LAKIP dari Tahun 2023 naik 0,78 point dari nilai Tahun 2022 dengan capaian nilai BB termasuk kategori sangat baik artinya akuntabilitas kerjanya sudah sangat baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimulai pada tahun 2017 yang merupakan tahun awal pendirian organisasi. Tahun 2017 nilai akuntabilitas hanya pada kategori cukup dengan nilai 51, Tahun 2018 naik menjadi kategori B dengan nilai 60,9, Tahun 2019 masih pada kategori B dengan nilai 64,71, Tahun 2020 mendapat kenaikan nilai yang cukup baik yaitu 68,85 dan Tahun 2021 mendapatkan nilai 69,94 diharapkan nilai kinerja ini akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

dari sejak awal didirikan sampai dengan saat ini atau Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar**  
**Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2017-2021**



**f. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan aturan melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan yang hasil pelaksanaan urusan tersebut terkait pelayanan tidak langsung bertemu dengan masyarakat namun dampaknya dari kegiatannya akan langsung berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pelayanan publik yang tidak secara langsung tersebut tetap harus diukur kualitasnya agar dapat melihat apakah kinerja urusan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang baik atau buruk. Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat yang menjadi *stakeholder* dari OPD yang bersangkutan.

Metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner yang dilakukan terhadap ASN dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik dinas dalam bentuk form kuesiner/google form yang disebar melalui WhatAPP. Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh diolah dan dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi dan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya dideskripsikan secara informatif dan komunikatif sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat yang diharapkan akan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.



**Tabel**  
**Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja**

No	Unsur	Rata-Rata	Index	Kinerja Unsur
1	Informasi Layanan Yang Diberikan	3,45	86,2	Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	3,36	83,8	Baik
3	Kompetensi/Kemampuan Personil Yang Melayani	3,32	82,9	Baik
4	Kedisiplinan Personil Dalam Melayani	3,27	81,7	Baik
5	Ketepatan Waktu Pelayanan Sesuai SOP	3,23	80,7	Baik
6	Kesopanan dan Keramahan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,30	82,4	Baik
7	Tanggung Jawab Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,26	81,4	Baik
8	Keadilan Personil Dalam Memberikan Pelayanan	3,19	79,7	Baik
9	Dukungan Infrastruktur Penunjang Pelayanan Yang Ada	3,24	81,1	Baik
Jumlah Rata-Rata Tertimbang			3,29	
IKM			82,2	
Nilai Mutu Pelayanan			B	
Kinerja Pelayanan			Baik	



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

#### **Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi Dengan kab/ kota serta K/L di tingkat pusat**

Koordinasi dengan kabupaten/kota dan kementerian/lembaga menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan. Terkait urusan tersebut koordinasi dilakukan dengan :

- a. Urusan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemendagri dan Bappenas selaku kementerian terkait dan OPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Koordinasi lain juga dilakukan dengan pihak swasta dan organisasi/lembaga/asosiasi profesi dan perbankan.
- b. Untuk Urusan pertanahan koordinasi dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, Kemendagri dan Bappenas selaku kementerian terkait dan OPD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pertanahan serta koordinasi dengan pihak swasta dan organisasi/lembaga/asosiasi profesi.
- c. Bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, forum lintas perangkat daerah dan sinkronisasi kegiatan secara langsung dilapangan.

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut ;

#### **Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas**

1. Back Log meningkat, dikarenakan Pertumbuhan penduduk , faktor lemahnya ekonomi masyarakat, akibat bencana alam,dll.



2. Ketersediaan Lahan (*Land Banking*), faktor ketersediaan tanah ini yang menyebabkan tersendatnya perkembangan pembangunan perumahan.
3. Permukiman Kumuh meningkat, dikarenakan faktor lemahnya ekonomi, dan kurangnya 'Sadar Hidup Bersih'.
4. Banjir di permukiman, dikarenakan sudah padatnya permukiman, daya tampung saluran yang ada sekarang sudah tidak memenuhi kapasitas yang ada, sehingga jika curah hujan tinggi mengakibatkan luapan air.
5. Sulitnya perizinan bagi pengembang, dikarenakan faktor ego sektoral.
6. Sulitnya persyaratan dari pihak Bank, dikarenakan pihak Bank memiliki peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menyulitkan masyarakat yang tidak punya slip gaji untuk memiliki rumah.
7. Penataan bangunan dan lingkungan masih belum optimal, dikarenakan kurangnya kepedulian akan penataan lingkungan yang layak. Dalam perencanaan rancangan kawasan perlu dipertimbangkan penataan lingkungan yang layak.
8. Ketersediaan Data Rumah Tidak Layak Huni yang Valid.

### **Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Kepala Daerah adalah Mewujudkan Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan dan misi yang terkait dengan tupoksi urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah pada Misi 6 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata dengan sasaran Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bangunan Strategis dan Pertanian. Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan dengan misi kepala daerah dalam bentuk :

1. Peningkatan kualitas perumahan terhadap rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh kewenangan provinsi sehingga masyarakat memiliki bangunan rumah yang lebih layak huni sesuai dengan standar bangunan dan memenuhi syarat kesehatan
2. Penyediaan infrastruktur dasar lingkungan pada permukiman berupa prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai sehingga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar permukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana regional.



3. Pembangunan infrastruktur yang terencana akan mendorong penataan ruang yang lebih baik, sehingga kawasan permukiman menjadi lebih teratur dan terintegrasi dengan fasilitas umum lainnya.
4. Pembangunan infrastruktur yang baru dapat menjadi momentum untuk melakukan revitalisasi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

### **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah**

Tantangan yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan Anggaran  
Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan program-program perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Pertambahan Penduduk dan Urbanisasi  
Peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur semakin meningkat, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia  
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perumahan dan permukiman dapat menghambat pelaksanaan program-program yang efektif.
4. Peraturan dan Kebijakan yang Kompleks  
Regulasi yang tumpang tindih dan kompleks seringkali menyulitkan dalam pelaksanaan program-program di lapangan.
5. Permasalahan Pertanahan  
Sengketa tanah, kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan isu-isu terkait pertanahan lainnya seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan permukiman.
6. Bencana Alam  
Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, membutuhkan upaya khusus dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang tahan bencana.
7. Perubahan Iklim  
Perubahan iklim juga menjadi tantangan serius, terutama dalam hal pembangunan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.



Peluang yang dimiliki adalah :

1. Teknologi Informasi  
Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan tata ruang, e-government untuk pelayanan perizinan, dan platform digital untuk partisipasi masyarakat.
2. Kemitraan dengan Sektor Swasta  
Kemitraan dengan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman, serta meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal  
Pemanfaatan sumber daya lokal seperti bahan bangunan lokal dan tenaga kerja lokal dapat mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan keberlanjutan.
4. Pengembangan Perumahan Vertikal  
Pengembangan perumahan vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.
5. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan  
Pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman dapat meningkatkan keberhasilan program dan keberlanjutannya.

### **Isu-Isu Strategis bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat**

1. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
  - a. Pengembangan permukiman baru
  - b. Peningkatan kualitas permukiman
  - c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
  - d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
  - e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan



- f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.
2. Isu Strategis Pembangunan Prasarana, Saran Utilitas Umum Kawasan
    - a. Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.
    - b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.

### **Isu-Isu Strategis bidang Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat**

Berkenaan dengan pengelolaan Bidang Pertanahan, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat .

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan.



### 3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010- 2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

### 4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berbelarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang **Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPD agar sesuai dengan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan rencana kerja sesuai dengan analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk mensinkronkan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sama dengan RKPD sehingga program yang menjadi prioritas utama tahunan yang merupakan kebijakan pada RKPD Tahun 2025 dapat direalisasikan. Hasil perbandingan tidak ditemukan perbedaan program/kegiatan karena dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan sudah mengakomodir kebijakan prioritas yang telah ditetapkan kepala daerah untuk Tahun 2025 yaitu :

- a. Sub kegiatan yang mendukung secara langsung ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta target Program Unggulan Tahun 2025;  
Kebijakan ini sudah diakomodir dengan program kegiatan yang merupakan IKD bagi Dinas Perkimtan.
- b. Sub kegiatan yang mengakomodir hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2025 terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status diakomodir (hasil musrenbang);  
Program usulan musrenbang sudah diakomodir melalui program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan PSU
- c. Sub kegiatan yang mengakomodir kategori belanja yang bersifat wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
Terkait dengan SPM Bidang Perumahan sudah diakomodir melalui Program Pengembangan Perumahan.
- d. Sub Kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas nasional antara lain Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Prevalensi Stunting. Untuk kebijakan ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlibat secara langsung tetapi mempunyai Program Kawasan Permukiman untuk penanganan kawasan kumuh dan



Program Peningkatan PSU Permukiman sebagai kegiatan dengan tujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar lingkungan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat di permukiman.



**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Provinsi Sumatera Barat**

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ..... Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>10.296.785.969,00</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>10.296.785.969,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>151.031.900,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>151.031.900,00</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	46.550.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	46.550.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	8.607.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	8.607.000,00	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	8.607.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	8.607.000,00	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.677.623.000,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.677.623.000,00</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	7.100.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	7.100.000.000,00	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	577.623.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	577.623.000,00	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>131.459.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>131.459.000,00</b>	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	36.400.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	36.400.000,00	
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18	95.059.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18	95.059.000,00	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>96.871.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>96.871.000,00</b>	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	41.250.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	41.250.000,00	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70	55.621.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70	55.621.000,00	
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>773.417.523,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>773.417.523,00</b>	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Padang	Jumlah Paket Komponen	1	9.789.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Padang	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	9.789.600,00	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ..... Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	115.024.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	115.024.600,00	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	70.811.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	70.811.000,00	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	13.585.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	13.585.000,00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	559.207.323,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	559.207.323,00	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5.000.000,00	
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>517.254.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>517.254.000,00</b>	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	479.479.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	479.479.000,00	
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	36.775.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	36.775.000,00	
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1.000.000,00	
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>479.778.704,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>479.778.704,00</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	476.778.704,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	476.778.704,00	
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Padang			<b>469.350.842,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>469.350.842,00</b>	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	268.020.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	268.020.000,00	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	39.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	39.150.000,00	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	162.180.842,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	162.180.842,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>1.821.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>1.821.000.000,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>1.300.000.000,00</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>1.300.000.000,00</b>	
2.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Lahan	1	600.000.000,00	Identifikasi Lahan-Lahan	Padang	Jumlah Dokumen Data Lahan yang	1	600.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ..... Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lokasi Relokasi Perumahan		yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
2.1.2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Sumbar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1	700.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Padang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1	700.000.000,00	
<b>2.2</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>236.000.000,00</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>236.000.000,00</b>	
2.2.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Sumbar	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50	150.000.000,00	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Padang	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	50	150.000.000,00	
2.2.2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50	36.000.000,00	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Padang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50	36.000.000,00	
2.2.3	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50	50.000.000,00	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Padang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	50	50.000.000,00	
<b>2.3</b>	<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>285.000.000,00</b>	<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>285.000.000,00</b>	
2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1	285.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Padang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1	285.000.000,00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>12.200.000.000,00</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>12.200.000.000,00</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	Sumbar			<b>500.000.000,00</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>500.000.000,00</b>	
3.1.1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Sumbar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1	300.000.000,00	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Padang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1	300.000.000,00	
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Padang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	200.000.000,00	
<b>3.2</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>11.700.000.000,00</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>11.700.000.000,00</b>	
3.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100	5.000.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Padang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100	5.000.000.000,00	
3.2.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan	Sumbar	Luas Kawasan Permukiman	10 Ha	6.700.000.000,00	Pelaksanaan Peremajaan	Padang	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan	10 Ha	6.700.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ..... Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan			Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>1.700.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>					<b>1.700.000.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	Sumbar			1.700.000.000,00	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>					1.700.000.000,00
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	57	300.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	57	300.000.000,00	
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Sumbar	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	200	1.200.000.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Padang	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	200	1.200.000.000,00	
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Sumbar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Padang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1	200.000.000,00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>				<b>817.830.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>					<b>817.830.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>				<b>397.000.000,00</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>					<b>397.000.000,00</b>
5.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Sumbar	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1	397.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Padang	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	1	397.000.000,00	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>				<b>101.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>					<b>101.000.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>101.000.000,00</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>					<b>101.000.000,00</b>
6.1.1	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dok	66.000.000,00	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Padang	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dok	66.000.000,00	
6.1.2	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	35.000.000,00	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Padang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	35.000.000,00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>				<b>102.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>					<b>102.000.000,00</b>
<b>7.1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>102.000.000,00</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>					<b>102.000.000,00</b>
7.1.1	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti	Sumbar	Jumlah laporan koordinasi	1	102.000.000,00	Koordinasi Penyelesaian Masalah	Padang	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian	1	102.000.000,00	



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025

OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Lembar ..... Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah			Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah			
<b>8</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>				<b>157.830.000,00</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>				<b>157.830.000,00</b>	
<b>8.1</b>	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>157.830.000,00</b>	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>157.830.000,00</b>	
8.1.1	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Sumbar	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1	157.830.000,00	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Padang	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1	157.830.000,00	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>				<b>60.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>				<b>60.000.000,00</b>	
<b>9.1</b>	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>60.000.000,00</b>	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>60.000.000,00</b>	
9.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	60.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Padang	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	60.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>26.835.615.969,00</b>					<b>26.835.615.969,00</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah yakni dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa usulan penyediaan PSU Permukiman yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun beberapa Usulan Program dan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Proses perolehan usulan program/kegiatan usulan dilakukan melalui beberapa pendekatan :

- a. Pendekatan teknokratis dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi lapangan berdasarkan basis data untuk dapat menetapkan lokasi penanganan kawasan kumuh provinsi dan permukiman
- b. Pendekatan politis terkait dengan aspirasi dari anggota legislatif provinsi yang banyak untuk mendukung Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- c. Pendekatan bottom up dan top down melalui mekanisme pelaksanaan musrenbang dan forum lintas OPD terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui penyampaian usulan langsung dari masyarakat ke pada dinas. Berbagai usulan ditampung dan diproses untuk kemudian disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Dan dalam penyusunan RKPD tahun 2024, DPRKP telah menelaah dan memproses usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut.

Usulan-usulan dari perangkat daerah, aspirasi anggota desan dan masyarakat untuk rencana kerja Tahun 2025 berkaitan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui



penyediaan Prasarana Sarana Umum dan Utilitas untuk menunjang fungsi permukiman dan kawasan kumuh provinsi sehingga urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

**OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				
1.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>				
1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	100 paket	100 Pokir
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Sumbar	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	2.530 paket	2.521 Pokir 9 Musreimbang
2	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
2.1	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	727 unit	727 unit
2.1.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Sumbar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	10,78 Ha	10,78 Ha



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2025



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

---

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, ditetapkan tujuh prioritas nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan



Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan yang wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2020 – 2024 terkait Bidang Perumahan dan Permukiman**

<b>INDIKATOR</b>	<b>Kondisi 2020</b>	<b>Target Akhir 2024</b>
<b>INFRASTRUKTUR DASAR</b>		
Kawasan Kumuh Perkotaan	1,5%	27.000 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	814 ribu unit	6,46 Juta unit

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategis lintas sektor. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2020-2024).

Arah kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:



- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
  - b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
  - c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
2. Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perumahan
- Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
  - b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi : (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4)



Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat tema pembangunan Tahun 2025 merupakan pertengahan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah peningkatan ekonomi pada tiga sektor yakni pertanian, UMKM dan pariwisata serta pemulihan akibat dampak dari pandemic Covid-19 sekaligus mendukung pencapaian tema RKP. Prioritas pembangunan Tahun 2025 untuk mewujudkan Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adai Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2 urusan yakni urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan sehingga mendukung misi ke-6 melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan permukiman.

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi tahun 2023 sebagai berikut :

### Evaluasi Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	4,73%	6,52%	149,20%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	34,51%	62,60%	181,40%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase masalah Pertanahan Yang	100%	100%	100%



NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pertanahan	Pertanahan	Ditangani			
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB	101,03%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	82,2%	97%

Adapun Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 dan 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2025
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	21,27%	28,35%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	51,77%	69,03%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	85%

### 3.3 Program dan Kegiatan



**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat**



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2024

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							Lembar ..... Dari		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>				<b>26.835.615.969,00</b>				<b>111.121.773.574,00</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				<b>10.296.785.969,00</b>				<b>89.754.060.574,00</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>151.031.900,00</b>				166.135.090,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	5	46.550.000,00	PAD		-	51.205.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	4	8.607.000,00	PAD		-	9.467.700,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	4	8.607.000,00	PAD		-	105.462.390,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>7.677.623.000,00</b>				<b>76.616.719.641,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	58	7.100.000.000,00	PAD		-	75.981.334.341,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	12	577.623.000,00	PAD		-	635.385.300,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>131.459.000,00</b>				<b>144.604.900,00</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	1	36.400.000,00	PAD		-	40.040.000,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	18	95.059.000,00	PAD		-	104.564.900,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>96.871.000,00</b>				<b>106.558.100,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang	1	41.250.000,00	PAD		-	45.375.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	70	55.621.000,00	PAD		-	61.183.100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>773.417.523,00</b>				<b>6.386.911.773,00</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2024

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang	1	9.789.600,00	PAD	-	10.768.560,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	43	115.024.600,00	PAD	-	126.527.060,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	12	70.811.000,00	PAD	-	77.892.100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	5	13.585.000,00	PAD	-	14.943.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang	1	559.207.323,00	PAD	-	6.151.280.553,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	1	5.000.000,00	PAD	-	5.500.000,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>517.254.000,00</b>			<b>568.979.400,00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1	479.479.000,00	PAD	-	527.426.900,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	28	36.775.000,00	PAD	-	40.452.500,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Padang	1	1.000.000,00	PAD	-	1.100.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>479.778.704,00</b>			<b>5.247.865.744,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	12	3.000.000,00	PAD	-	3.300.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	4	476.778.704,00	PAD	-	5.244.565.744,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Padang		<b>469.350.842,00</b>			<b>516.285.926,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	9	268.020.000,00	PAD	-	294.822.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	60 unit	39.150.000,00	PAD	-	43.065.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Padang	3	162.180.842,00	PAD	-	178.398.926,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>1.821.000.000,00</b>			<b>5.103.100.000,00</b>
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>1.300.000.000,00</b>			<b>1.430.000.000,00</b>
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Sumbar	1	600.000.000,00	PAD	-	660.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2024

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Sumbar	1	700.000.000,00	PAD	-	770.000.000,00
	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>236.000.000,00</b>			259.600.000,00
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Sumbar	50	150.000.000,00	PAD	-	165.000.000,00
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sumbar	50	36.000.000,00	PAD	-	39.600.000,00
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Sumbar	50	50.000.000,00	PAD	-	55.000.000,00
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>							<b>3.100.000.000,00</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi						1.500.000.000,00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana							1.500.000.000,00
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah						100.000.000,00
	<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>				<b>285.000.000,00</b>			<b>313.500.000,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		1	285.000.000,00	PAD	-	313.500.000,00
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>12.200.000.000,00</b>			<b>13.495.000.000,00</b>
	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>		Sumbar		<b>500.000.000,00</b>			625.000.000,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Sumbar	1	300.000.000,00	PAD	-	330.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Sumbar	1	200.000.000,00	PAD	-	220.000.000,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					-	75.000.000,00
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>				<b>11.700.000.000,00</b>			<b>12.870.000.000,00</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Sumbar	100	5.000.000.000,00	PAD	-	5.500.000.000,00



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2024

	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Sumbar	10 Ha	6.700.000.000,00	PAD	-	7.370.000.000,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>1.700.000.000,00</b>			<b>1.870.000.000,00</b>
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>		Sumbar		1.700.000.000,00	PAD	-	1.870.000.000,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Sumbar	57	300.000.000,00	PAD	-	330.000.000,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Sumbar	200	1.200.000.000,00	PAD	-	1.320.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Sumbar	1	200.000.000,00	PAD	-	220.000.000,00
	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>				<b>817.830.000,00</b>			<b>436.700.000,00</b>
	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>				<b>397.000.000,00</b>			<b>436.700.000,00</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Sumbar	1	397.000.000,00	PAD	-	436.700.000,00
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>				<b>101.000.000,00</b>			<b>111.100.000,00</b>
	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>101.000.000,00</b>			<b>111.100.000,00</b>
	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1 Dok	66.000.000,00	PAD	-	72.600.000,00
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1	35.000.000,00	PAD	-	38.500.000,00
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>				<b>102.000.000,00</b>			<b>112.200.000,00</b>
	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>				<b>102.000.000,00</b>			<b>112.200.000,00</b>
	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Sumbar	1	102.000.000,00	PAD	-	112.200.000,00
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>				<b>157.830.000,00</b>			<b>173.613.000,00</b>



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat 2024

	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>157.830.000,00</b>				<b>173.613.000,00</b>
	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Sumbar	1	157.830.000,00	PAD		-	173.613.000,00
	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>				<b>60.000.000,00</b>				66.000.000,00
	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>				<b>60.000.000,00</b>				66.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumbar	1	60.000.000,00	PAD		-	66.000.000,00



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

#### **4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Bagian ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, program nasional dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisoli



**Tabel 4.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2025**

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
	1	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>
	1.04	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
I	1.04.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>
1	1.04.01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>
01.01		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
01.02		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.03		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	1.04.01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
02.01		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.02		02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	1.04.01 1.03	<b>Adiminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
03.01		02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
03.02		04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
4	1.04.01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
04.01		02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
04.02		09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	1.04.01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
05.01		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
05.02		02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
05.03		03 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
05.04		04 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
05.05		05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
05.06		06 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	1.04.01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
06.01		02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
06.02		06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
06.03		09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	1.04.01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
07.01		01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
07.02		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	1.04.01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
08.01		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
08.02		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
08.03		10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
9	1.04.02 1.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>
09.01		02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
09.02		11 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
10	1.04.02 1.02	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>
10.01		01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
10.02	09	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
10.03	10	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
11	1.04.02 1.04	<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>
11.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
III	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
12	1.04.03 1.01	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>
12.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
12.01	17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
13	1.02	<b>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>
13.01	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
13.02	13	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha
IV	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
14	1.04.05 1.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>
14.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
14.02	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
14.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
	2.10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
V	2.10.03	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>
15	2.10.03 1.01	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>
15.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
VI	2.10.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
16.01	2.10.04 1.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>
16.02	05	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
16.03	06	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
VII	2.10.05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
17	2.10.05 1.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>
17.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
VIII	2.10.06	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
18	2.10.06 1.01	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>
18.01	05	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
IX	2.10.07	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>
19	2.10.07 1.01	<b>Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>



No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
19.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

#### 4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dan APBN Tahun Anggaran 2025.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

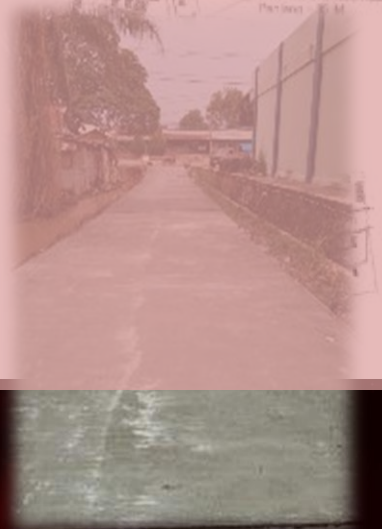
---

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta target Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Renja Tahun 2025 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dan menjadi bahan materi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun semoga dapat membantu pelaksanaan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Padang, Januari 2024

Kepala Dinas

dto

**RIFDA SURIANI, ST, Sp**  
NIP 19680516 199503 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD 2020 .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	72
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	75
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	75
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>76</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	76
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	79
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>89</b>
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	89
4.2 Pendanaan.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>